

NOMOR INDEKS SURAT DINAS,Kode klasifikasi Arsip

Disusun Oleh : Ahmad Satibi (Sekretaris Desa Malangsari)

Lanjutan 1

Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Karawang

RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

000	UMUM	500	PEREKONOMIAN
100	PEMERINTAH	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
200	POLITIK	700	PENGAWASAN
300	KEAMANAN/KETERTIBAN	800	KEPEGAWAIAN
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	900	KEUANGAN

147 **Pembangunan Desa**

.1 Pembinaan usaha gotong royong

.11 Swadaya gotong royong

.111. Penataan gotong royong

.112. Gotong royong dinamis

.113. Gotong royong statis

.114. Pungutan

.12 Lembaga Sosial Desa (LSM)

.121. Pembinaan

.122. Klasifikasi

.123. Proyek

.124. Musyawarah

.13 Latihan Kerja Masyarakat

.131. Kader masyarakat

.132. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

.133. Pusat Latihan

.134. Kursus – kursus

- .135. Kurikulum/Silabus
- .136. Keterampilan
- .137. Pramuka
- .14 Pembinaan Keluarga sejahtera
- .141 Program
- .142 Pembinaan organisasi
- .143 Kegiatan
- .15 Penyuluhan
- .151 Publikasi
- .152 Peragaan
- .153 Sosio darma
- .154 Siaran Pedesaan
- .155 Penyuluhan Lapangan
- .16 Kelembagaan Desa
- .161 Kelompok Tani
- .162 Rukun Tani
- .163 Subak
- .164 Dharma Tirta
- .165 Mitra Cai
- .2 Perekonomian Desa**
- .21 Produksi Desa
- .211 Pengolahan
- .212 Pemasaran
- .22 Keuangan Desa
- .211 Perkreditan Desa
- .212 Inventarisasi Desa
- .213 Perkembangan / Pelaksanaan
- .214 Bantuan / Stimulasi
- .215 Petunjuk / Pembinaan Pelaksana
- .23 Koperasi Desa
- .231 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .232 Koperasi Unit Desa (KUD)
- .24 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- .241 Jumlah desa yang diberi bantuan
- .242 Pengarahan
- .243 Pusat
- .244 Daerah
- .25 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .251 Pusat
- .252 Daerah
- .26 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .261 Bantuan Langsung
- .262 Bantuan Keserasian
- .263 Bantuan Juara lomba desa

.3 Prasarana Desa

- .31 Pembinaan
- .32 Bimbingan teknis
- .33 Pemukiman kembali penduduk
- .34 Musyawarah Pedesaan
 - .341 Pembinaan
 - .342 Penyuluhan
- .35 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa
 - .351 Rumah sehat
 - .352 Proyek perintis
 - .353 Pelaksanaan
 - .354 Pengembangan
 - .355 Perbaikan kampung

.4 Pengembangan desa

- .41 Tingkat perkembangan desa
 - .411 Jumlah desa
 - .412 Pemekaran desa
 - .413 Pembentukan desa baru
 - .414 Evaluasi
 - .415 Bagan
- .42 Unit daerah kerja pembangunan (UDKP)
 - .421 Penyusunan program
 - .422 Lokasi UDKP
 - .423 Pelaksanaan
 - .424 Bimbingan / Pembinaan
 - .425 Evaluasi
- .43 Tata Desa
 - .431 Inventarisasi
 - .432 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .433 Aplikasi Tata Desa
 - .434 Pemetaan
 - .435 Pedoman pelaksanaan
 - .436 Evaluasi
- .44 Perlombaan Desa
 - .441 Pedoman perlombaan desa
 - .442 Penilaian
 - .443 Kejuaraan
 - .444 Piagam

.5 Koordinasi

- .51 Sektor khusus
- .52 Rapat koordinasi horizontal (RHK)
- .53 Team koordinasi pusat
- .54 Kerjasama
 - .541 Luar negeri

.542	Perguruan Tinggi
.543	Departemen/ non departemen
148	Perangkat Kelurahan
.1	Kepala Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.2	Sekretaris Kelurahan, meliputi : Pengangkatan,Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.3	Kepala Lingkungan, meliputi : Pengangkatan,Pemberhentian dan pemberhentian sementara
.4	Administrasi Kelurahan
.5	Lembaga-lembaga tingkat Kelurahan
149	RT / RW
150	MPR / DPR
151	Keanggotaan MPR
.1	Pencalonan
.2	Pengangkatan
.3	Pemberhentian
.31	Recall
.32	Meninggal
.4	Pergantian Antar Waktu
.5	Pelanggaran
152	Persidangan MPR
153	Kesejahteraan
.1	Keuangan
.2	Penghargaan
154	Hak / Suara / Pendapat MPR
155	Keanggotaan DPR
.1	Pencalonan
.2	Pengangkatan
.3	Pemberhentian
.31	Recall
.32	Meninggal
.4	Pergantian Antar Waktu
.5	Pelanggaran
156	Persidangan DPR
.1	Sidang Pleno
.2	Dengar Pendapat
.3	Rapat Komisi
.4	Reses
157	Kesejahteraan
.1	Keuangan
.2	Penghargaan

- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak / Suara / Pendapat DPR
 - .1 Amandemen
 - .2 Angket
 - .3 Bertanya
 - .4 Budget
 - .5 Interpelasi
- 160 **DPRD PROVINSI**
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
 - .5 Pergantian Antar Waktu
- 162 Persidangan
 - .1 Tata tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar pendapat
 - .4 Rapat-rapat,
meliputi : Rapat panitia musyawarahKomisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan studi banding
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak / Suara / Pendapat
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 170 **DPRD KABUPATEN / KOTA**
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 172 Persidangan
 - .1 Tata tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar pendapat

- .4 Rapat-rapat,
meliputi : Rapat panitia musyawarah Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia anggaran
- .5 Reses
- .6 Peninjauan studi banding
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak / Saran /Pendapat
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota

- 180 **HUKUM**
 - .1 Konstitusi
 - .11 Dasar Negara
 - .12 Undang Undang Dasar
 - .2 Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
 - .3 Revisi UUD, UU
- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah
 - .3 Utang/Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notaris
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
 - .1 Jenis-jenis Peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Peradilan Negeri tingkat pertama
 - .112 Pengadilan Tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .12 Peradilan Agama Islam
 - .121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
 - .122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - .123 Mahkamah Agung agama Islam
 - .13 Peradilan Militer
 - .131 Mahkamah militer tingkat pertama
 - .132 Mahkamah militer tinggi
 - .133 Mahkamah militer agung
 - .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
 - .15 Peradilan Koneksitas

- .2 Upaya-upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kasasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
- .3 Eksekusi
- .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran hukum (KADARKUM)
- .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Pasport
 - .3 Exit / Permit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas / Batas antar Negara
- 186 Kependudukan
- 187 Kejaksaan
 - .1 Saksi
 - .2 Terdakwa
- 188 Peraturan Perundang-undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-undang
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga non Departemen
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Propinsi
 - .342 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
 - .4 Keputusan
 - .41 Keputusan Presiden
 - .42 Keputusan Menteri
 - .43 Keputusan Lembaga Non Departemen
 - .44 Keputusan Gubernur
 - .45 Keputusan Bupati/Walikota
 - .5 Instruksi
 - .51 Instruksi Presiden
 - .52 Instruksi Menteri
 - .53 Instruksi Lembaga Non Departemen
 - .54 Instruksi Gubernur
 - .55 Instruksi Bupati/Walikota

189	Hukum Adat
	.1 Tokoh Adat/Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
	.1 Bilateral
	.2 Multilateral
	.3 Regional (ASEAN)
	.4 Internasional
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
	.1 Kedutaan
	.2 Konsulat
	.3 Kuasa Usaha
	.4 Atase
195	Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
	.1 UNESCO
	.2 UNICEF
	.3 FAO
	.4 UNHCR
	.5 WHO
	.6 Organisasi Lainnya
196	Laporan Luar Negeri

Next